

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Batas Administrasi

Daerah Provinsi Jawa Barat terletak di pulau Jawa bagian Barat, di bagian selatan dibatasi lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi beberapa wilayah lainnya yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta ;
- Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah ;
- Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia ;
- Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten.

Secara administrasi Provinsi Jawa Barat terbagi dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa.

2. Luas Wilayah

Provinsi Jawa Barat terletak di antara 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' - 108° 48' Bujur Timur, sedangkan luas wilayah Jawa Barat meliputi 29.275,98 Km². Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10 % dari luas Jawa Barat; curah hujan berkisar antara 2000 - 4000 mm/th dengan tingkat intensitas hujan tinggi; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 milyar m³/tahun dan air tanah 150 juta m³/th.

3. Iklim

Menurut catatan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Provinsi Jawa Barat ini memiliki iklim tropis, dengan suhu cuaca mencapai 9 °C yang berada di daerah Puncak Gunung Pangrango dan memiliki suhu cuaca mencapai 34 °C yang berada pada daerah di Pantai Utara, curah hujan dari Provinsi Jawa Barat ini rata-rata mencapai 2.000 mm per tahun, namun terdapat di beberapa wilayah yang berada di daerah kawasan pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun.



Gambar 4. 1
Peta Provinsi Jawa Barat

4. Kependudukan

Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 48, 68 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33,16 juta jiwa penduduk Jawa Barat merupakan usia produktif (usia 15-64 tahun) dan 15,52 juta jiwa usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Angka tersebut berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk Indonesia 2013 yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Pusat Statistik dan United Population Fund. Dependency Ratio (angka ketergantungan) di Jawa Barat pada 2018 sebesar 46,8%. Artinya bahwa setiap 100 orang usia produktif terdapat sekitar 47 orang usia tidak produktif yang menjadi beban tanggungan penduduk usia produktif.

Menurut kelompok jenis kelamin, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki ada sebanyak 24,6 juta jiwa sedangkan perempuan berjumlah 24 juta jiwa dengan seks ratio 103%. Artinya terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Menurut kelompok umur, jumlah kelompok umur 0-4 tahun adalah populasi yang tertinggi di Tanah Pasundan dengan jenis kelamin laki-laki 2,2 juta jiwa dan perempuan 2,1 juta jiwa.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2018 tumbuh melambat dibanding triwulan I 2018. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat melambat dari 5,96% (yoy) pada triwulan I 2018 menjadi 5,65% (yoy) pada triwulan II 2018. Namun realisasi ini masih lebih tinggi dibanding rata-rata LPE triwulan II pada kurun waktu 2015-2017 yang tercatat sebesar 5,44%. LPE triwulan II 2018 juga lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2017 yang tercatat sebesar 5,35% (yoy). Perlambatan ini dipengaruhi oleh kebijakan hari libur Lebaran yang lebih panjang dibanding tahun sebelumnya, sehingga proses produksi tertahan. Hal ini tercermin dari front loading strategy yang dilakukan oleh industri pada triwulan I 2018. Dari sisi pengeluaran, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2018 disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan investasi dan net ekspor luar negeri. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU), laju pertumbuhan mayoritas lapangan usaha di Jawa Barat khususnya lapangan usaha utama, yakni industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi turut menahan pertumbuhan ekonomi

Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III 2018 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan II 2018, dengan proyeksi pertumbuhan pada rentang 5,2% - 5,6% (yoy).

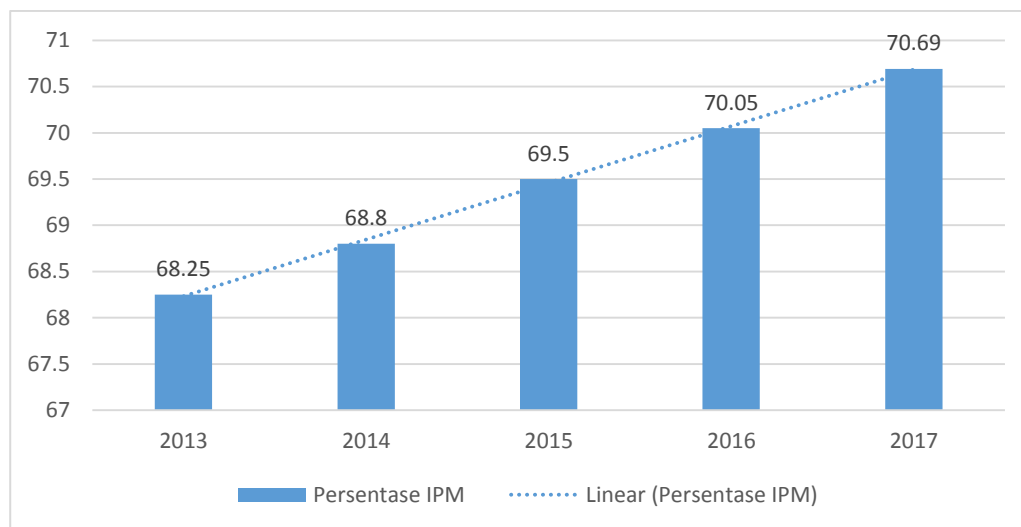
Sementara itu secara keseluruhan tahun ekonomi Jawa Barat diperkirakan dapat tumbuh pada kisaran 5,4% - 5,8% (yoy). Dari sisi pengeluaran, perlambatan diperkirakan terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, perlambatan diperkirakan berasal dari indikasi melambatnya perdagangan, dan jasa-jasa.

B. Perkembangan Variabel Penelitian

1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat

Pembangunan manusia menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan sosial ekonomi di suatu daerah maupun nasional. Pemerintah daerah maupun pemerintah Republik Indonesia sedang gencarnya dalam melaksanakan program pembangunan yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat khususnya yang memiliki pendapatan rendah. Program yang bersifat intervensi dianggap sangat diperlukan mengingat masih terjadinya ketimpangan pendapatan maupun faktor-faktor dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Untuk mengevaluasi perkembangan pencapaian pembangunan tersebut dibutuhkan sebuah indikator yang mampu merangkum semua aspek dari pembangunan manusia dan salah satu indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia

yang diukur berdasarkan aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan kemampuan secara ekonomi. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, dibawah ini merupakan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat yaitu, sebagai berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, data diolah

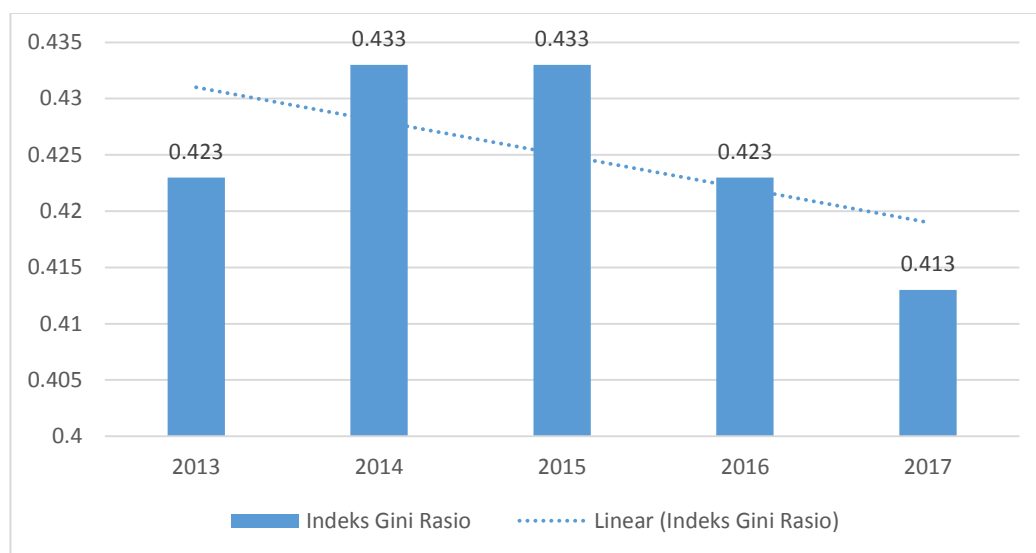
Gambar 4. 2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Berdasarkan gambar 4.2 diatas bisa dilihat bahwa dalam setiap tahunnya IPM Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan setaip tahunnya sejak tahun 2013-2017. Kemajuan yang telah dicapai oleh Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan manusia cukup signifikan. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan yang cukup berarti dari 68,25 persen pada tahun 2013 menjadi 68,80 persen pada tahun 2014 dan terus mengalami peningkatan setaip tahunnya menjadi 70,69 persen pada tahun 2017. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masuk dalam kategori tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2017 yaitu dengan nilai persentase yang mencapai 70,69 persen. Sedangkan yang

masuk kedalam kategori dengan nilai persentase tersendah terjadi pada tahun 2013 dengan nilai persentase mencapai 68,25 persen.

2. Perkembangan Gini Rasio

Dalam perhitungan menggunakan indeks gini memiliki rasio angka antara 0 dan 1. Apabila indeks gini sama dengan 0 maka artinya terjadi distribusi pendapatan yang sempurna atau merata karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Namun, apabila indeks gini sama dengan 1 maka terjadi ketimpangan distribusi pendapatan sempurna karena seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang atau individu tertentu saja. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, diperoleh indeks gini di wilayah Provinsi Jawa Barat yang digambarkan yaitu, sebagai berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, data diolah

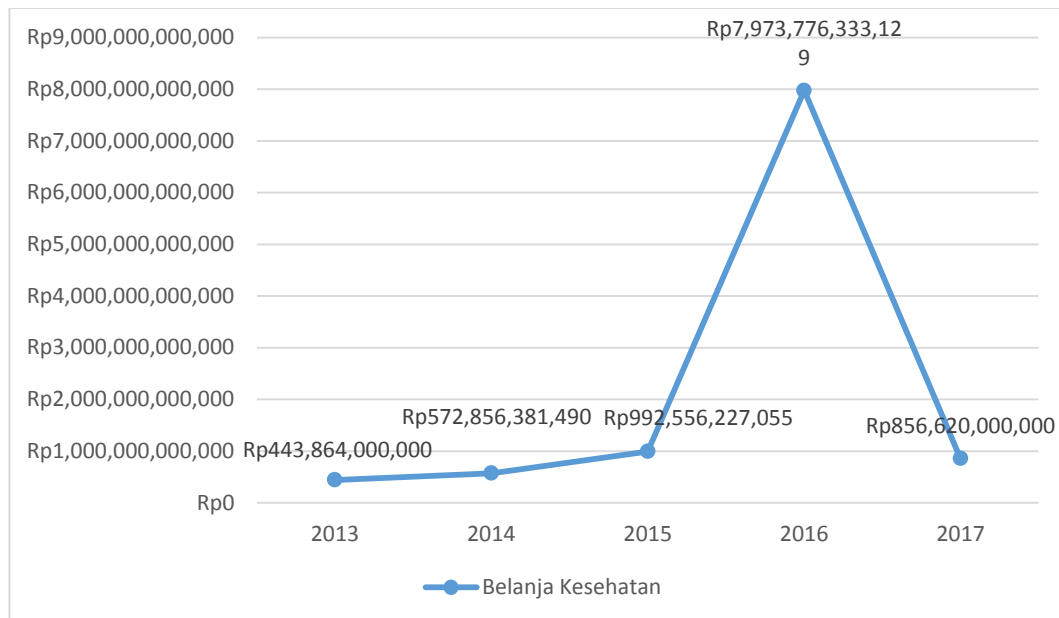
Gambar 4. 3
Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2013-2017

Berdasarkan gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa tingkat rasio gini atau ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Barat masih berada dalam kategori normal dan dalam perkembangannya bergerak secara fluktuatif dan konstan. Ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan menggunakan indeks gini ratio ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 dan 2015 memiliki indeks gini rasio yang memiliki nilai yang sama atau konstan yaitu berada dalam kategori terendah dengan nilai 0,433. Akan tetapi, meskipun terlihat begitu perkembangan atau tren rasio gini ini berfluktuatif dan cenderung meningkat. Terbukti pada tahun 2016 rasio gini meningkat nilainya menjadi 0,423 dan terus meningkat perkembangannya pada tahun 2017 nilainya menjadi 0,413. Penurunan rasio gini berarti telah terjadi peningkatan dalam masalah distribusi pendapatan. Penurunan ketimpangan pendapatan ini dapat berakibat menurunnya jumlah penduduk miskin dan dapat mengoptimalkan pendapatannya guna untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan yang dipergunakan untuk mengurangi permasalahan dalam pemabangunan manusia di wilayah Provinsi Jawa Barat.

3. Anggaran Pengeluaran Pemerintah daerah Bidang Kesehatan

Dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah peran dari Pemerintah daerah sangatlah diperlukan peranannya terutama dalam melakukan pembelanjaan, salah satunya adalah dalam belanja pemerintah dalam bidang kesehatan. Diharapkan dengan semakin besarnya belanja pemerintah daerah untuk kesehatan semakin meningkat juga derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Barat yang diharapkan dapat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah di

wilayah Provinsi Jawa Barat. Dibawah ini merupakan perkembangan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan yaitu sebagai berikut :



Sumber : APBD Provinsi Jawa Barat, data diolah

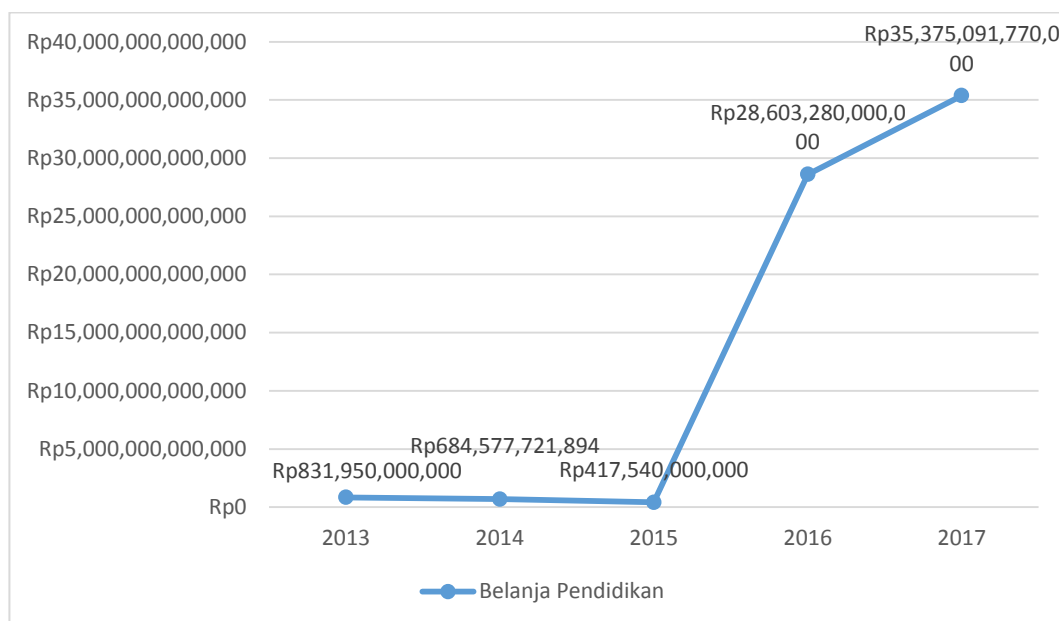
Gambar 4. 4 **Perkembangan Anggaran Pemerintah Daerah Bidang Belanja Kesehatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017**

Berdasarkan gambar 4.4 diatas menunjukkan bahwa perkembangan anggaran bidang kesehatan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 jumlah belanja kesehatan yaitu sebesar Rp. 443.864.000.000 dan merupakan anggaran belanja kesehatan yang paling minim. Kemudian, pada tahun 2014 anggaran belanja kesehatan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 552.856.381.490 dan pada tahun 2015 anggaran belanja kesehatan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 992.556.227.055 dan trennya terus mengalami kenaikan sampai tahun 2016 yang merupakan anggaran belanja kesehatan tertinggi yaitu menjadi sebesar Rp. 7.973.776.333.129. Namun,

pada tahun 2017 anggaran belanja kesehatan mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu menjadi sebesar Rp. 856.620.000.000. Walaupun anggaran belanja kesehatan Provinsi Jawa Barat perkembangannya berfluktuatif tetapi perkembangannya cenderung meningkat dan dapat menaikkan angka indeks kesehatan di Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu faktor penentu kenaikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4. Anggaran Pengeluaran Pemerintah daerah Bidang Pendidikan

Pendidikan yaitu salah satu faktor yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, faktor pendidikan ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Dalam bidang pendidikan variabel-variabel yang mempengaruhi bidang pendidikan yaitu seperti jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah murid seringkali dimunculkan sebagai gambaran situasi suatu pendidikan Pemerintah memiliki peran dalam mengalokasikan serta mendistribusikan dananya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan agar terciptanya pembangunan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan fungsi serta peran pendidikan di suatu daerah. Dengan demikian pendidikan di suatu daerah dapat menghasilkan dan mencetak generasi yang lebih berintegritas dan berkompeten dalam semua bidang. Dibawah ini merupakan suatu perkembangan anggaran pemerintah daerah di bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat yaitu, sebagai berikut :



Sumber : APBD Provinsi Jawa Barat, data diolah

Gambar 4. 5 **Perkembangan Anggaran Pemerintah Daerah Bidang Belanja Pendidikan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017**

Berdasarkan gambar 4.5 diatas menunjukkan bahwa perkembangan anggaran bidang pendidikan mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2013-2017. Anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 sebesar Rp 831.950.000.000, tahun 2014 mengalami penurunan anggaran pendidikan menjadi sebesar Rp 684.577.721.894, tahun 2015 juga anggaran pendidikan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 417.540.000.000. Namun pada tahun 2016 anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 28.603.280.000.000, dan pada tahun 2017 anggaran pendidikan terus meningkat menjadi sebesar Rp. 35.375.091.770.000.

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi situasi seperti ini, besar harapan masyarakat Provinsi Jawa Barat agar Pemerintah dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam menyikapi situasi tersebut, supaya kualitas pendidikan di Indonesia terutama di Provinsi Jawa Barat dapat jauh lebih baik lagi kedepannya. Karena dari pendidikan yang baik dapat menciptakan masyarakat yang baik dan dapat menciptakan generasi yang mempunyai intelektual yang tinggi di kemudian hari.